



DISKOMINFO SP KABUPATEN TANAH BUMBU

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Tanah Bumbu memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021–2026 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Akhirnya kami berharap LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Tanah Bumbu, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian



Al Husain Mardani, SE
Pembina / IV.a
NIP.19830511 200701 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan seluruh bidang/bagian di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 telah ditetapkan lima sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo-SP Kabupaten Tanah Bumbu Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSADIAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Layanan Informasi Publik	1. Meningkatnya Pemerintahan Yang berbasis Elektronik	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,49-4,19 (BAIK)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		22.626.421.250
							Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	390.148.000
							Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	21.665.382.850
							Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	102.508.000
							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	77.448.400
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	390.934.000



		2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.994.795.995 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 56.219.000 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 17.800.836.995 Pelayanan Informasi Publik 41.390.000 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 96.350.000
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	414.369.050 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 192.937.850 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 221.431.200
3	Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Untuk Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.369.289.750 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.252.219.750 Pengembangan Infrastruktur 117.070.000

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban selama tahun 2024, sebagai wujud pelaksanaan sasaran strategis Dinas Komunikasi , Informatika , Statisti dan Persandian yang menjadi tugas dan fungsi (tupoksi) yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Laporan Kinerja ini berisi hasil capaian dan analisis keberhasilan atau kegagalan program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia Tahun 2021-2026 , Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Renstra Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian telah menentukan tujuan, sasaran strategis program dan arah kebijakan yang fokus pada pelaksanaan transformasi digital terhadap tiga pilar utama yaitu, pemerintah digital, masyarakat digital, dan



ekonomi digital.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Meningkatnya Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik
2. Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik
3. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 4 (empat) Indikator, yaitu :
 1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
 2. Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat
 3. Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun
 4. Persentase Keamanan Data dan Informasi Daerah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG.....	1
MAKSUD DAN TUJUAN	2
STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
ISU STRATEGIS	7
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI.....	10
DASAR HUKUM.....	14
SISTEM PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
RENCANA STRATEGIS 2021-2026	17
RENCANA KINERJA.....	20
PERJANJIAN KINERJA	26
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	27
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SAKIP TAHUN 2024	31
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
ANALISIS DAN SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	46
REALISASI ANGGARAN	49
BAB IV PENUTUP	
KESIMPULAN	52
SARAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas
Tabel 2.2	Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan hasil Review/Perubahan Tahun 2023 dan Tahun 2024
Tabel 2.3	Indikator Kinerja (Permendagri 18 Tahun 2020) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026
Tabel 2.4	Indikator Utama Tahun 2024
Tabel 2.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
Tabel 2.8	Rencana Belanja Tahun Anggaran 2024
Tabel 2.9	Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024
Tabel 3.4	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Kerja Pelayanan
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Persandian
Tabel 3.6	Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Tahun 2023 dan 2024
Tabel 3.7	Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator-indikator Kinerja Utama
Tabel 3.8	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Tahun 2024



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.



Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok yang strategis yaitu meningkatkan pelayanan publik bidang informasi dan komunikasi demi terwujudnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah dan e-government yang terintegrasi. pada paragraf 12 pasal 40 bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintahan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun sebagai satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan anggaran selama tahun 2022. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah



sebagai alat kendali, evaluasi dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi, informatika Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dalam revisi Renstra tahun 2021-2026 akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik bidang informasi komunikasi Statistik dan Persandian demi terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan e- government yang terintegrasi yang merupakan bagian dari sistem birokrasi selaku integrator system Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu juga fokus dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal dinas sendiri. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh integritas, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Transparansi dan Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik



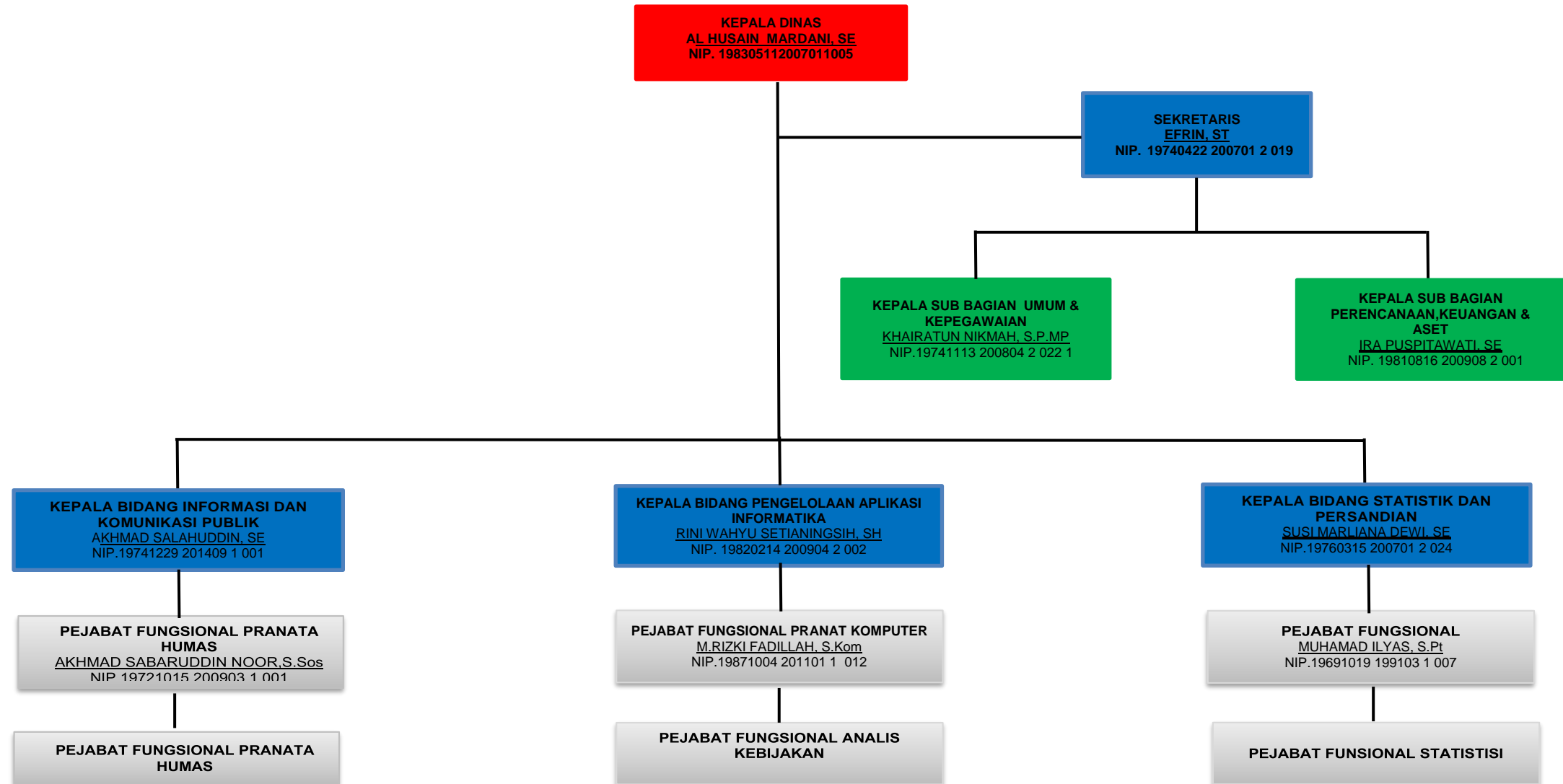
LAKIP DISKOMINFO-SP TAHUN 2024

Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagan struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh: Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2024 , memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian. Struktur organisasi adalah sebagai berikut :



GAMBAR 1. 1
STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada bulan Desember 2021 Perubahan perda menjadi nomor 9 tahun 2021 bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintahan daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang e-Governmen, pelayanan Media Informasi Masyarakat, dan Bidang Statistik Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu (Diskominfo-SP), merupakan salah satu lembaga teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Diskominfo berdiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2016 sesuai UU 23 Tahun 2014 tersebut beberapa hal yang menjadi pembahasan tentang pemetaan urusan Kominfo, penyusunan RPP tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun struktur organisasi Dinas Kominfo adalah Tipe B.

Sebagai organisasi yang mengemban tugas menangani urusan wajib non pelayanan dasar, Pengelolaan Komunikasi Publik, informatika, statistik dan persandian, DISKOMINFO-SP telah mengalami beberapa pencapaian. Pencapaian tersebut merupakan berbagai hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Berikut nama-nama jabatan dan struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu., sesuai perda nomor 9 tahun 2021 pada pasal 41 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:

a. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Informasi; dan

2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.

c. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Domain; dan
2. Seksi Pengelolaan E-Government.

d. Bidang Statistik dan Persandian terdiri atas:

1. Seksi Statistik; dan
2. Seksi Persandian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

E. ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah Tercapai. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” karena belum optimalnya tata Kelola dan kebijakan yang mengatur dalam SPBE
- b. Beberapa indikator kinerja kunci belum dapat mencapai target, diantaranya Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dikarenakan Pandemi sehingga tidak dapat melaksanakan pembinaan KIM.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya :

Permasalahan :

1. Belum Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik.
2. Masih Kurangnya Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika.
3. Data Pembangunan Belum Satu Data.
4. Pemahaman Pengelolaan Statistik Sektorial Belum Seragam.
5. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana
6. Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Kurang
7. Keamanan Informasi Daerah Masih Belum Optimal

Hambatan :

1. Kurangnya Pemahaman tentang SPBE dan Pelayanan Publik
2. Kondisi Geografis dan Keterjangkauan Wilayah
3. Belum Sinkronnya data pembangunan (belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik)
4. Kurangnya Pemahaman tentang pengelolaan data statistik sectoral
5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
6. Kurangnya Pelatihan dan Bimtek
7. Kurangnya Pemahaman Tentang Keamanan Informasi Daerah

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dan peluang yang dimiliki oleh Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Upaya penentuan nilai-nilai strategis tantangan dan peluang dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan threats). Analisis ini untuk menginstrumenkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten. Tanah Bumbu, maka faktor internal dan eksternal tersebut sebagai berikut :



Faktor Internal :

a. Strengths (Kekuatan)

1. Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2. Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu

b. Weaknesses (Kelemahan)

1. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi guna mendukung implementasi program Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang
3. Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai

Faktor Eksternal

a. Opportunities (Peluang)

1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Kebutuhan sarana komunikasi dan telekomunikasi yang terus meningkat.
4. Kebutuhan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (SPBE)
5. Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Informasi.

b. Threats (Ancaman)

1. Globalisasi Informasi yang berdampak pada keterbukaan Informasi Publik.
2. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Dan komunikasi
3. Cakupan Layanan Telekomunikasi yang masih sangat terbatas.
4. Koneksitas data dan informasi yang saling terintegrasi antar SKPD.
5. Keanekaragaman Data Statistik.
6. Pengamanan Informasi

Statistik Sektoral Belum Seragam, Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana, Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Kurang, Keamanan Informasi Daerah Masih Belum Optimal dan Penghambat Kurangnya Pemahaman tentang SPBE dan Pelayanan

Publik, Kondisi Geografis dan Keterjangkauan Wilayah, Belum Sinkronnya data pembangunan (belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik), Kurangnya Pemahaman tentang pengelolaan data statistik sektoral, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kurangnya Pelatihan dan Bimtek dan Kurangnya Pemahaman Tentang Keamanan Informasi Daerah. Dan Faktor Pendorongnya ; Memaksimalkan peran serta SKPD terhadap tercapainya hasil yang memuaskan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, Meningkatkan Komunikasi / dialog langsung dengan masyarakat secara intens dalam memberikan masukan yang sifatnya membangun, Meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan informatika dengan cara peremajaan sarana dan prasarana TIK, Memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi, Menjaga konsistensi dan Akurasi data dengan memanfaatkan sistem informasi untuk merekam/mencatat data secara digital dan mutakhir, Meningkatkan pemahaman tentang statistik dan pengelolaannya, Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Mengikut sertakan Pelatihan/Bimtek/Diklat Tekhnis, Meningkatkan pemahaman tentang keamanan informasi daerah dengan cara sosialisasi.

F. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Bumbu nomor 09 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan fungsi, Diskominfo-SP Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 53 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian. Jumlah dan komposisi pegawai Diskominfo -SP Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi pegawai DiskominfoSP berdasarkan pendidikan

NAMA PERANGKAT DAERAH	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA/ SMA	SLTP/ SMP	SD/ MI	JUMLAH TOTAL
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik, dan	4	35	0	5	19	1	0	64

Persandian Kabupaten. Tanah Bumbu									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 1.2 Komposisi pegawai DiskominfoSP berdasarkan Golongan Ruang

NAMA PERANGKAT DAERAH	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	TOTAL
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik, dan Persandian Kabupaten. Tanah Bumbu	0	0	4	4	3	4	3	3	2	23

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten dalam pencapaian Visi dan Misi pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi tersebut.

Faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :

1. Untuk menunjang tugas rutin sehari-hari, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian saat ini memiliki jumlah pegawai 64 orang, yang terdiri dari 23 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 37 Tenaga Non ASN (Tenaga Tekhnis) dan 4 orang Cleaning service, Pramu Taman, loper koran, Petugas Keamanan Tahun Anggaran 2024.
2. Pegawai Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten. Tanah

Bumbu sebesar 90,54 % berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencana.

3. Adanya dokumen perencanaan daerah yang hirarkinya sudah jelas yaitu: jangka panjang, menengah dan panjang

Faktor-faktor kelemahan antara lain :

1. Relatif tingginya frekuensi gangguan listrik di Komplek Pemda sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Ruang Server belum memadai (Ruang Server belum dilengkapi dengan Genset, Presisi dan lain-lain) sehingga mengganggu layanan jaringan komunikasi data.
2. Belum memadainya jumlah SDM yang memenuhi kompetensi bidang TIK dan Statistik yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan TUSI DISKOMINFO-SP dalam urusan Komunikasi dan Informatika serta belum adanya penambahan Formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK
3. Minimnya anggaran terkait pelaksanaan tugas dan layanan *Disaster Recovery Centre*, data warehouse, interoperabilitas/integrasi sistem informasi, pengelolaan data elektronik, Sarana dan Prasarana pendukung pengamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah.
4. Belum optimalnya kelembagaan dari seksi Keamanan Informasi dikarenakan memiliki singgungan dengan tugas fungsi dengan Seksi Persandian.
5. Sulitnya memantau/monitoring isu publik dari beberapa media cetak dan media sosial, secara manual.
6. Terdapatnya kesalahan/ kekurangan alokasi anggaran untuk tim penyusun regulasi membuat proses penyusunannya terhambat.
7. Terdapatnya kegiatan bimtek smart city yang diluar perencanaan awal membuat pelaksanaan beberapa sub kegiatan lain terganggu
8. Minimnya jumlah responden pengguna layanan e-lapor, yang merespon kuisioner survey.
9. Belum optimalnya tindak lanjut dari SKM.
10. Belum ada pengelola data statistik sektoral di Perangkat Daerah dan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah belum memiliki standar dan metadata.

Faktor-faktor peluang antara lain :

1. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan kebutuhan informasi publik.
3. Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat;
4. Penyelenggaraan layanan jaringan Komunikasi Data di lingkungan Pemkab Kabupaten Tanah Bumbu
5. Penyediaan Aplikasi penunjang e-Government;
6. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
7. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan dan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi.

Faktor-faktor ancaman antara lain :

1. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas perkembangan teknologi di daerah.
2. Belum terintegrasinya beberapa aplikasi yang tersedia di beberapa Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu
3. Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.
4. Ketidakpahaman dan ketidaktahuan para stakeholder tentang keberadaan, tugas pokok dan fungsinya diskominfo.
5. Belum konsistennya penerapan azas desentralisasi
6. Belum tersedianya petunjuk operasional dari beberapa peraturan perundangan.
7. Adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor.
8. Belum adanya Sinergitas antara Program Nasional dan Program daerah.

Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, adalah terdiri dari :

1. Mengikuti sertakan personil yang belum mengikuti diklat, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidangnya.
2. Komitmen antar bidang/sekretariat maupun di dalam bidang/sekretariat belum berjalan secara optimal. Antara lain dalam hal pengumpulan data, perencanaan, penganggaran dan kerjasama dalam hal pekerjaan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, sarana transportasi, peralatan kantor (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).
4. Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat;
5. Penyelenggaraan layanan jaringan Komunikasi Data di lingkungan Pemkab Kabupaten Tanah Bumbu
6. Penyediaan Aplikasi penunjang e-Government;
7. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu.

G. DASAR HUKUM

Beberapa peraturan yang melandasi tugas dan fungsi DISKOMINFO-SP, antara lain adalah :

1. Peraturan Bupati Nomor : 17 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian
2. Peraturan Bupati Nomor :09 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Peraturan Bupati nomo 19 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan E-Goverment dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Peraturan Bupati nomor 20 Tahaun 2014 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi sekretaris Daerah

6. Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah.

H. SISTEM PENYAJIAN

1. Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LAKIP dan sistem penyajian LAKIP

2. Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil reuiu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen



Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

a. Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan level Pelaksana
2. Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025
3. IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2024 dan Tahun 2025
5. Laporan Interim / Triwulan Tahun 2024
6. Laporan Keuangan TW.IV Tahun 2024
7. Cascading /Pohon Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025
8. Matrik Keselarasan Tahun 2024 dan 2025
9. Rencana Aksi Tahun 2024 dan Tahun 2025
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
11. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024
12. Laporan Kinerja (LKJ) SKPD Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja, serta merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan per tahun yang merupakan rangkaian pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berkelanjutan.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2021- 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2021 - 2026. Renstra disusun dengan berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan RPJMD untuk mendukung pencapaian Visi “Kabupaten Tanah Bumbu membangun Tanah Bumbu Membangun Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis”, yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mantap, untuk menopang daya saing pelayanan publik dan perekonomian;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang arif, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Mewujudkan perekonomian daerah, berbasis pengembangan potensi maritim dan agroindustri; dan
5. Membangun tata kelola pemerintahan yang melayani, sederhana dan akuntabel.

Dalam kurun waktu 2021 - 2026 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional. Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi Indonesia. Untuk mencapai hasil yang diinginkan selama 5 (lima) tahun, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu mendukung Visi, Misi Kabupaten Tanah Bumbu, rencana strategis, tujuan, dan sasaran serta rencana kerja yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka pencapaian-pencapaian tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, “Untuk mewujudkannya Diskominfo-SP dalam Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Kabupaten Tanah Bumbu yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan terkait urusan-urusan tersebut diatas menjadi urusan yang berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan salah satu perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan SOTK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati No. 20 tahun 20 tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu.

Selain perubahan SOTK evaluasi dan review juga dilakukan pada RPJMD yang berimbas pada perubahan Renstra yang disusun oleh Perangkat daerah yang ada di kabupaten Tanah Bumbu termasuk Diskominfo-SP. Adapun target kinerja Diskominfo-SP jika didasarkan pada perubahan RPJMD maka masuk pada Misi Kelima seperti yang tergambar pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas

Visi: Membangun Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis Dinas
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Berakhlak Mulia. 2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian. 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. 4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri. 5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel”	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan 4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan - Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja baik - Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman - Meningkatnya Kualitas air minum dan sanitasi - Menurunkan resiko terjadinya bencana - Meningkatnya Kualitas Air dan Udara - Meningkatkan Tutupan Lahan - Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Wisata - Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian - Meningkatnya Iklim Investasi - Meningkatnya Sektor Industri dan Perdagangan - Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah - Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatnya Kemandirian Desa

Dalam rangka mencapai misi Kabupaten Tanah Bumbu maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, maka ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Berdasarkan hal itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026. Dalam kaitan itu, tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu adalah

1. Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik
2. Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah Sasaran.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung pelaksanaan misi ke-5 (lima) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

B. RENCANA KINERJA

Rencana kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Dalam dokumen laporan kinerja, capaian kinerja yang diukur oleh setiap instansi pemerintah adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu,

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu; spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur. Dalam menetapkan IKU, Dinas Komiumikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada tujuan dan sasaran Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026. Rencana kerja Dinas Komiumikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan sasaran Strategis adalah;

1. KINERJA UTAMA

- a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPBE, dengan target 2.60-3,49 (BAIK)
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik, dengan target 76%
- c. Meningkatnya Data Pelayanan Statistik Sektorial Daerah, dengan target 100%
- d. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan informasi Daerah, dengan target 100%

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- a. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- b. Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat
- c. Persentase Dokumen Statistik Sektorial yang Tersusun
- d. Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah

Hasil review pada IKU dan penetapan Kinerja Diskominfo-SP maka terdapat beberapa perubahan dimana indikator yang bersifat output diganti oleh indikator dengan level outcomes (hasil). Adapun perbandingan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) awal dengan hasil review dapat ialah seperti tersaji pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan hasil
Review/Perubahan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<i>a. Urusan Komunikasi dan Informatika</i>		<i>a. Urusan Komunikasi dan Informatika</i>	
1. Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik	Persentase Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi(TIK)	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat
<i>b. Urusan Statistik dan Persandian</i>		<i>b. Urusan Statistik</i>	
2. Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu	Persentase Informasi / Data daerah yang diamankan	3. Meningkatnya pelayanan data statistik sectoral daerah	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun
		<i>c. Urusan Persandian</i>	
		4. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 2.3. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil

dicapai atau tidak. Adapun target indikator Kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan ialah seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja (Permendagri 18 Tahun 2020)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		71,43 %	80,95 %	88,10 %	95,24 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online dan terintegrasi		22,22 %	29,63 %	37,04 %	44,44 %	51,85 %	51,85 %	51,85%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program		70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00%



	prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot a								
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4
Indikator Utama Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2024	FORMULA
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	2.60 - 3,49 (BAIK)	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan pemerintah <u>daerah Kabupaten/Kota</u> X 100 % Jumlah Penduduk
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPBE	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	76,00 %	Jumlah Aplikasi SPBE dan Infrastruktur Jaringan <u>SKPD yang terintegrasi</u> Jumlah Aplikasi dan infrastruktur yang Seharusnya di integrasikan X 100%
3. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	100 %	Data/Indikator yang di Validasi/ <u>Di Update dibagi data yang harus divalidasi/ di Update</u> x 100 %
4. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan	Persentase Area Keamanan Data dan Informasi Daerah	100 %	Jumlah Dokumen yang Tersedia /Jumlah Dokumen yang Seharusnya Tersedia

Pada proses pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan ditunjang oleh 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Urusan tersebut ditunjang oleh 5 Program (1 rutin PD dan 4 urusan wajib non dasar) dan program yang ada di uraikan dalam 28 sub kegiatan pada tahun 2024.

Tabel 2.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
4. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2024, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Predikat	2.60 - 3,49 (BAIK)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	%	76%

Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	%	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Predikat	Jumlah Aplikasi SPBE dan Infrastruktur Jaringan SKPD yang terintegrasi Jumlah Aplikasi dan infrastruktur yang Seharusnya di integrasikan X 100%	SKPD Terkait

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	%	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota X 100 % Jumlah Penduduk	
Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	%	Data/Indikator yang di Validasi/ Di Update dibagi data yang harus divalidasi/ di Update x 100 %	SKPD Terkait
Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Prosentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	%	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	SKPD Terkait

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 50.752.836.957,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Rencana Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi	40.440.750.195,00	79.97
2	Belanja Modal	10.312.086.762,00	20.03
Jumlah		50.752.836.957,00	100

Alokasi anggaran belanja Operasi tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.9

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	22.626.421.250,00	44.58%	22.176.301.890,00	98.01%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	17.994.795.995,00	35.45%	17.359.454.006,00	96.47%
Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	1.369.289.950,00	0.03%	1.359.889.013,00	99.31%
Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	414.369.050,00	0.008%	412.295.278,00	99,50%
JUMLAH		42.404.876.045,00	83.55%	41.307.940.681,00	97.49%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.347.960.912,00	16.45%	8.169.900.937,00	97,87 %
TOTAL	50.752.836.957,00	100%	49.477.841.624,00	97.49%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 50.752.836.957,00,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Tata Kelola SPBE yaitu Rp 22.626.421.250,00 dengan besaran persentase dari anggaran sebesar 44.58%, dengan realisasi Rp. 22.176.301.890,00,- atau 98,01% . Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar Rp17.994.795.995,00,- adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik dengan besaran presentase 35.45% dengan realisasi Rp. 17.359.454.006,00 atau sebesar 96,47%. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah anggarannya Rp. 1.369.289.950,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.359.889.013,00 , -atau persentase 99,31%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran sebesar Rp. 414.369.050,00,- yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah target persentase 0.008% dari total anggaran terealisasi Rp. 412.295.278,00,- atau 99,50% .

Selain program / Kegiatan sasaran pembangunan ada program penunjang urusan dengan total Anggaran Rp. 8.347.960.912,00,- dengan kegiatan rutin terealisasi Rp. 8.169.900.937,00,- atau 97.87 % . Jadi total keseluruhan Anggaran Diskominfo-SP pada tahun 2024 Rp. 50.752.836.957,00,- realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 49.477.841.624,00,- atau sebesar 97,49 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

A. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SAKIP PADA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 terdapat 4 rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat pada evaluasi SAKIP yaitu ;

1. Perencanaan Kinerja belum ada berisikan tentang informasi tentang hubungan kinerja, Strategi, bahkan aktivitas antar bidang / crosscutting. Tindak lanjutnya yaitu membuat alur kinerja dan crosscutting yang sudah dikirimkan ke tim evaluator.
2. Pengukuran Kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data dan pengukuran Kinerja. Tindak Lanjut membuat dan mengembangkan aplikasi melalui aplikasi e – monev pro yang difasilitasi oleh Bappedalitbang.
3. Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Tindak lanjut dalam penyusunan SAKIP TAHUN 2024 sudah dimuat perbaikan – perbaikan dari tahun 2023.
4. Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.
 - a. Tindak Lanjut melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai

standar.

- b. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 4 sasaran yang akan dicapai. Ke Empat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 4 indikator utama. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel 3.1. Metode evaluasi kinerja ialah dengan membandingkan indikator target yang telah ditetapkan dengan realisasi sehingga dapat diketahui persentase capaian dari indikator.

Uraian atau Definisi perhitungan indikator kinerja pada Diskominfo-SP pada tahun 2022 sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja Utama, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian	Nilai Means
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil	95,5

2	81 % sampai 90 %	Baik (Berhasil)	85,5
3	61 % sampai 80 %	Cukup (Berhasil)	70,5
4	Kurang dari 60 %	Kurang (Berhasil)	30,5

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2024. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ada 4 (empat) Kinerja Utama, dan ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tanah Bumbu Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Kategori	Means
1.	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis	2.60 - 3,49 (BAIK)	3,33 (BAIK)	95,41%	Sangat Berhasil	95,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	76%	83.12%	109%	Berhasil	95,5
3.	Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	100 %	100%	100%	Sangat Berhasil	95,5

4.	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	100 %	52,40 %	52,40%	Kurang Berhasil	30,5
----	--	--	-------	---------	--------	-----------------	------

Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil) = $(3 \times 95,5)/4$ = 71,62

Capaian Indikator Kinerja Utama (Kurang Berhasil) = $(1 \times 30,5)/4$ = 7,62

Total rata – rata capaian Kinerja Utama = 79.24

Secara keseluruhan, capaian kinerja utama Eselon II berada pada kategori CUKUP BERHASIL. Dari tabel diatas dapat diuraikan evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama tersebut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.3:

Tabel 3.3

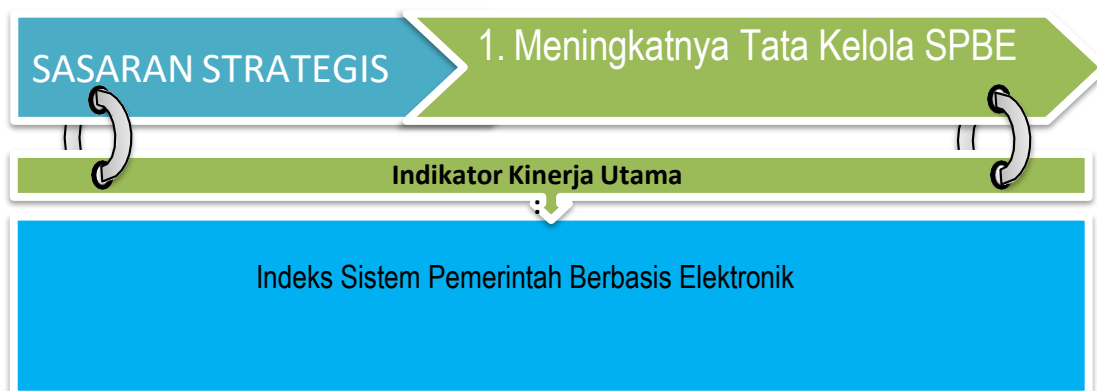
Hasil Pengukuran Kinerja Utama

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis	2.60 - 3,49 (BAIK)	3,33 (BAIK)	95,41%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	74%	75%	109%	Berhasil
3.	Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral	Persentase Dokumen Statistik Sektoral	100 %	100%	100%	Sangat Berhasil

	daerah	yang Tersusun				
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	100 %	52,40 %	52,40%	Kurang Berhasil

a. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik



Indikator kinerja / Sasaran Strategis dari Kepala Dinas yang pertama ini adalah Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada tahun 2023 indeks (nilai) SPBE dari Kabupaten Tanah Bumbu yang Sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB adalah 3,17 dengan predikat B. Dan penilaian SPBE untuk tahun 2024 mendapat nilai 3,33 dengan predikat B. Tujuan dari penerapan SPBE ini adalah agar pemerintahan bersih, akuntabel, efisien dan efektif. Dengan system elektronik masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi berkaitan dengan program kerja dan laporan keuangan. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan Program Aplikasi Informatika dengan Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dana sebesar Rp. 390.148.000, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribuan Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan jumlah realisasi anggaran Rp

387.483.000,- atau 99,32% .Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen). Dan realisasi tahun 2024 adalah 3 dokumen yaitu :

- STRD (surat tgaian retribusi daerah)
 - SKRD (surat Ketetapan Retribusi Daerah)
 - Laporan Pengawasan Menara Telekomunikasi
2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp 21.762.907.850 dan realisasi sebesar Rp 21.316.117.890.atau sebesar 97,95%. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen) realisasi tahun 2024 adalah 6 dokumen hasil penyelenggaraan sistem Komunikasi Intra pemerintah Daerah, yaitu
- Laporan layanan internet Desa
 - Laporan layanan internet SKPD
 - Laporan Layanan internet wisata
 - Laporan pembuatan aplikasi media center android dan ios
 - Laporan pembangunan infrastrur pembangunan menara Kantor Kecamatan Teluk Kepayang
 - Laporan fasilitasi digitalisasi
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan pagu sebesar Rp 102.508.000 dan realisasi sebesar Rp 102.295.000 atau sebesar 99.79 %. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik yang Terlaksana (Jenis). Dan realisasi nya adalah koordinasi di semua OPD yaitu 41 OPD.
4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp

77.448.400 dan realisasi sebesar Rp 76.997.000 atau sebesar 99,42% . Sub Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Jenis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terlaksana (Jenis) dan realisasi adalah 4 jenis laporan dari 4 angkatan peserta RAWABATIK.

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan pagu sebesar Rp 293.409.000 dan realisasi sebesar Rp 293.409.000 atau sebesar 100%. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen) dan realisasi dari indikator ini adalah 5 dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE. 5 dokumen ini adalah :

- Hasil Penilaian SPBE dari kemenpanrb
- Hasil evaluasi mandiri SPBE di Pemkab
- SK Tim Koordinasi SPBE
- BAP Evaluasi mandiri SPBE
- Hasil rapat Koordinasi Tim SPBE

b. Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat



Indikator Kinerja Persentase hasil kepuasan masyarakat adalah indicator terbaru dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dengan formulasi Survei kepuasan masyarakat. Indicator ini dianggap perlu mengetahui kepuasan

masyarakat tentang pelayanan komunikasi publik yang telah dilakukan. Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan Survei kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang telah disebar ke masyarakat melalui uji sampling. Berikut hasil SKM tahun 2024 :

JENIS LAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE
LAYANAN KONTRAK	30	24%
LAYANAN INTERNET	89	70%
LAYANAN INTRANET	8	6%
JUMLAH RESPONDEN	127	

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden pengguna layanan yang diperoleh yaitu 87 orang responden, Adapun karakteristik responden Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH
1	JENIS KELAMIN	LAKI	61
		PEREMPUAN	26
2	PENDIDIKAN TERAKHIR	SMA	32
		D1 - D3	3
		D4 - S1	45
		> S2	7
3	PEKERJAAN	Swasta	17
		Wirausaha	6
		Jurnalis	3
		Perangkat Desa	21
		Non ASN	13
		PNS /PPPK	20
4	JENIS LAYANAN	Lainnya	7
		E-LAPOR!	5
		PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan	1

	Dokumentasi)	
	Media Center	23
	Penerbitan Sertifikat Elektronik	3
	Penyediaan data statistik sektoral	4
	Rawabatik (Ruang Aktivitas Warga Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi)	7
	Jaringan internet dan Intranet SKPD & Jaringan Internet Desa	21
	Sub Domain & Hosting	2
	Rekomendasi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	6
	Pengelolaan Website / Aplikasi	15

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam penghitungan IKM terdapat 9 (sembilan) unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata - rata tertimbang	=	$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$	=	$\frac{1}{9}$	=	0,11
------------------------------------	---	---	---	---------------	---	------

Catatan : untuk keseragaman pengolahan data, bobot nilai rata-rata tertimbang memakai angka 0,11.

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM	=	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	x	Nilai Penimbang
-----	---	---	---	-----------------

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKM (Sebelum Konversi)} \times 25$$

Adapun nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

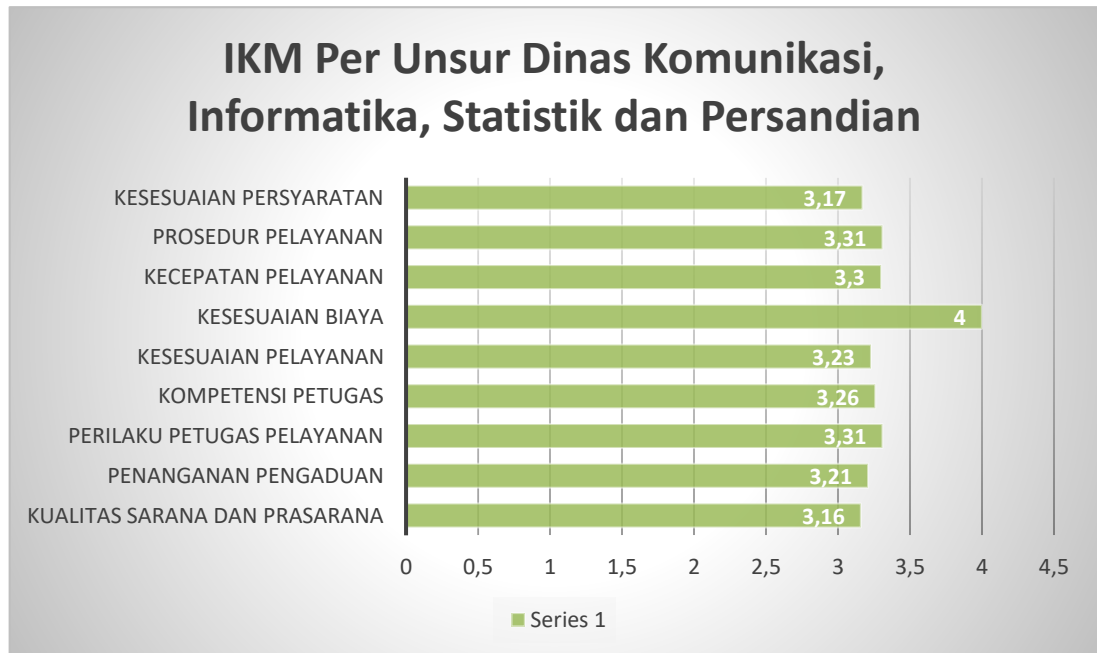
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Kerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pengolahan Data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,17	3,31	3,30	4,00	3,23	3,26	3,31	3,21	3,16
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	83,12 (B atau BAIK)								

Tergambar dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Berdasarkan tabel diatas, diperoleh Persentase responden yang menjawab pertanyaan pada kuesioner mengenai Layanan Publik dengan rata-rata presentase sebesar 83.12% dan itu termasuk dalam kriteria Baik. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan Program Informasi Komunikasi Publik dengan Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah anggaran sebesar Rp. 56.219.000 dengan realisasi sebesar Rp. 47.531.400 atau (84,55%) dengan indicator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen). Indikator ini menjelaskan tentang laporan aduan masyarakat yang diproses dan realisasinya pada tahun 2024 adalah 100%, karena parameter dari indicator ini adalah bahwa berapapun jumlah laporan atau aduan masyarakat yang masuk maka sejumlah itu pula laporan atau aduan masyarakat yang diproses dan pada tahun 2024 aduan masyarakat yang diproses adalah sebanyak 43 aduan
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 17.800.836.995 dan realisasi sebesar Rp 17.189.541.406 atau (96,57%)

Realisasi dari indicator kinerja pada tahun 2024 adalah 1500 berita atau 150% dari target yang telah di tentukan sebanyak 1000 berita yang dibuat. Pencapaian hasil sesuai target karena didukung SDM dan anggaran yang tersedia sehingga kegiatan yang berjalan melebihi dengan yang direncanakan.

3. Pelayanan Informasi Publik kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 41.390.000. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.743.200.atau (98,44%) dengan indicator kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen).Target dari indikator ini adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen atau 100%.
4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 96.350.000 terealisasi Rp. 81.638.000 atau sebesar 84.73% dengan indicator Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen), Pencapaian realisasi pada tahun 2024 ini ada sebanyak 49 kelompok informasi masyarakat yang di bina.

c. Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun

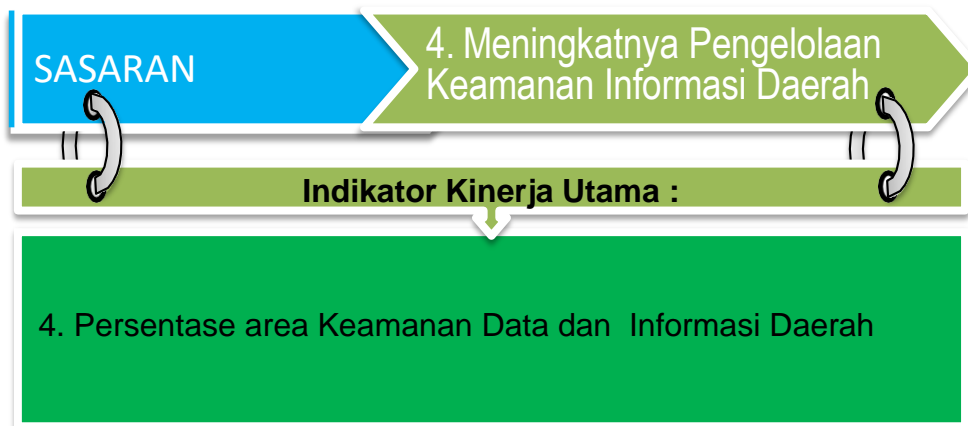


Indikator Kinerja Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang tersusun pada tahun 2024 capaian nya adalah 100%. Pada Tahun 2024 ini dokumen Statistik Sektoral yang tersusun adalah NTP (Nilai Tukar Petani) sebanyak 250 buku dan buku IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 50 buku.

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.252.219.750, terealisasi sebesar Rp. 1.245.107.229 atau sebesar 99,43%. dengan indikator kegiatan Jumlah Laporan Statistik Sektorial yang disusun (Laporan). Target 1 dokumen yang tersusun dan realisasi adalah 1 dokumen.
2. Pengembangan Infrastruktur dengan pagu anggaran sebesar Rp 117.070.000 dan realisasi sebesar Rp 114.781.784 atau sebesar 98,05%. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Pengembangan satu data satu peta (Aplikasi). Dan realisasi adalah 100%.

d. Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah



Sasaran ke empat ini juga sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka tanggung jawab pengelolaan urusan statistik sebagai penyelenggaranya adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi. Melaksanakan

program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini diukur dengan formulasi jumlah nilai per area keamanan informasi atau jumlah area penilaian. Realisasi tahun 2023 adalah 52,40 % Area penilaian ada 5 aspek yaitu ;

1. Tata Kelola	78
2. Pengelolaan Risiko	45
3. Kerangka kerja pengamanan Informasi	63
4. Pengelolaan Aset	72
5. Teknologi dan keamanan informasi	80
Total area penilaian	338

Dari persentase diatas untuk pengamanan informasi di Kabupaten Tanah Bumbu masih di kategoritinggi dengan indeks 16. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perarea penilaian terutama di area pengelolaan resiko. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Persandian

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Layanan Persandian	1.Jumlah SKPD yang menerapkan Persandian	41	41	41	41	100%	100%
		2.Jumlah alat pendukung utama dan peralatan pendukung persandian yang berfungsi	4	4	2	1	50%	25%

	TOTAL CAPAIAN	75%	62,5%
--	----------------------	------------	--------------

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik mempunyai anggaran sebesar Rp. 192.937.850, dan terealisasi sebesar Rp. 191.715.778 (99,37%),
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 221.431.200 dan realisasi sebesar Rp 220.580.000.

Tabel 3.6

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Tahun 2023 dan 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	B	C	B	B
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	72%	75%	76%	83.12%
3.	Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	100%	54.2%	100%	54.2%

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra

Tabel 3.7
Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator-indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah						Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian 2024 terhadap RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
1.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2.60 - 3,49 (BAIK)	2.60 - 3,49 (BAIK)	2.60 - 3,49 (BAIK)	3,50 - 4,19 (SANGAT BAIK)	3,50 - 4,19 (SANGAT BAIK)	3,50 - 4,19 (SANGAT BAIK)	3.17 (B)	3,33 (B)	79.47%
2.	Prosentase Hasil Kepuasan Masyarakat	70,00 %	72,00 %	74,00 %	76,00 %	78,00%	80,00%	75%	83,12%	103%
3.	Prosentase Dokumen Statistik Sektorial yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	54.2%	54.2%	54.2%

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Analisis Keberhasilan

Pada bahasan di atas, telah dijelaskan secara komprehensif bahwa secara umum capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 sebesar 76,74% dengan kategori “Cukup Berhasil”. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor pendorong yaitu :

- a. Kerja keras, komitmen dan goodwill segenap aparatur Dinas Komonikasi,

informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan program dan kegiatan

- b. Kuatnya sinergitas Dinas Komonikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dengan Stakeholder (Media Elektronik, Surat Kabar, Berita Online, Radio dan Youtube, Facebok, IG dan Media Lainnya).

2. Analisis Kegagalan

Di balik keberhasilan yang dicapai Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu jugamenghadapi tantangan atau hambatan yang menyebabkan kegagalan Dinas Komonikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan atau merealisasikan program /kegiatan yang ditargetkan, yaitu :

- a. Terbatasnya anggaran;
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dibidang teknologi informasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dibidang IT
- d. Cakupan layanan Informasi yang sangat luas (kabupaten/kota yang memerlukan kuantitas dan kualitas aparatur Dinas Komonikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu).
- e. Keamanan Informasi belum optimal.

3. Analisis Alternatif Solusi yang Dilakukan

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di atas,Dinas Komonikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai upaya alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi, yaitu :

- a. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap kegiatan –kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pentingnya (urgensinya) kegiatan tersebut dilaksanakan dan kemampuan dukungan dana yang tersedia;

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas intensitas pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pegawai Dinas Kominfo Provsu, khususnya di bidang teknologi informasi;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang IT.

Tabel 3.8

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Tingkat Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	95,41%	98,01%	(2,6%)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat	109%	96,47%	12.53%
3.	Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	100%	99,31%	0.69%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Persentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	52,40%	99,50%	47,1 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan dari empat sasaran yang di usung oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan tujuan ada 2 sasaran yang belum bisa efisiensi anggaran yang pertama untuk sasaran indeks SPBE dan pengelolaan keamanan Informasi hal ini disebabkan karena ada beberapa indicator di SPBE yang belum bisa dipenuhi begitu juga hal nya dengan presentase area keamanan informasi daerah ada beberapa hal yang belum bisa maksimal. Kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan lebih meefisiensi dengan anggaran yang ditentukan dipastikan kinerja bisa terwujud

maksimal.

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.752.836.957,00,- realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 49.477.841.624,00,- atau sebesar 97,49 %. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Operasi dengan anggaran Rp. 40.440.750.195,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.440.747.195,00 dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 10.312.086.762,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.037.094.429,00 (99,77%). Uraian target dan realisasi keuangan pada tahun 2024 tersaji seperti Pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw IV	Realisasi	
		Setelah Perubahan	Keuangan	Keuangan	
			(Rp)	Rp	%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.347.960.912,00	8.347.960.912,00	8.169.900.937,00	97,87%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.828.580.800,00	4.828.580.800,00	4.694.647.469,00	97,23%
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.884.007.040,00	3.884.007.040,00	3.760.315.831,00	96,82%
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	944.573.760,00	944.573.760,00	934.331.638,00	98,92%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.261.287.712,00	2.261.287.712,00	2.249.187.914,00	99,46%
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.167.800,00	14.167.800,00	14.167.800,00	100,00%
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	929.006.812,00	929.006.812,00	919.259.800,00	98,95%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.403.200,00	51.403.200,00	51.403.200,00	100,00%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.470.000,00	143.470.000,00	142.646.500,00	99,43%
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	196.387.900,00	196.387.900,00	195.468.500,00	99,53%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	926.852.000,00	926.852.000,00	926.242.114,00	99,93%
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.141.600,00	105.141.600,00	105.141.600,00	100,00%

2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	105.141.600,00	105.141.600,00	105.141.600,00	100,00%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.667.800,00	374.667.800,00	350.868.454,00	93,65%
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.345.000,00	128.345.000,00	109.092.954,00	85,00%
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.300.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00	100,00%
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.022.800,00	196.022.800,00	191.475.500,00	97,68%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.283.000,00	778.283.000,00	770.055.500,00	98,94%
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.284.000,00	182.284.000,00	177.256.500,00	97,24%
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	595.999.000,00	595.999.000,00	592.799.000,00	99,46%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	17.994.795.995,00	17.994.795.995,00	17.359.454.006,00	96,47%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.994.795.995,00	17.994.795.995,00	17.359.454.006,00	96,47%
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	56.219.000,00	56.219.000,00	47.531.400,00	84,55%
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	17.800.836.995,00	17.800.836.995,00	17.189.541.406,00	96,57%
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	41.390.000,00	41.390.000,00	40.743.200,00	98,44%
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	96.350.000,00	96.350.000,00	81.638.000,00	84,73%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	22.626.421.250,00	22.626.421.250,00	22.176.301.890,00	98,01%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.626.421.250,00	22.626.421.250,00	22.176.301.890,00	98,01%
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	390.148.000,00	390.148.000,00	387.483.000,00	99,32%
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	21.762.907.850,00	21.762.907.850,00	21.316.117.890,00	97,95%
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	102.508.000,00	102.508.000,00	102.295.000,00	99,79%
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	77.448.400,00	77.448.400,00	76.997.000,00	99,42%
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	293.409.000,00	293.409.000,00	293.409.000,00	100,00%

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.369.289.750,00	1.369.289.750,00	1.359.889.013,00	99,31%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.369.289.750,00	1.369.289.750,00	1.359.889.013,00	99,31%
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1.252.219.750,00	1.252.219.750,00	1.245.107.229,00	99,43%
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	117.070.000,00	117.070.000,00	114.781.784,00	98,05%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	414.369.050,00	414.369.050,00	412.295.778,00	99,50%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	414.369.050,00	414.369.050,00	412.295.778,00	99,50%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	192.937.850,00	192.937.850,00	191.715.778,00	99,37%
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	221.431.200,00	221.431.200,00	220.580.000,00	99,62%
		50.752.836.957	50.752.836.957	49.477.841.624	97,49%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi, dan misi yang diembannya dalam mencapai sasaran strategis tahun 2024. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam perspektif prospek internal, sasaran strategis perspektif layanan, serta sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan (kelembagaan) yang merupakan dampak

Dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 masuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, yaitu 79.24% yang didasarkan pada ketentuan skala penilaian peringkat kinerja. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu mengalami sama dengan pada tahun 2023 capaian kinerja Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu tidak berubah.
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu bersumber dari APBD TA. 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, dimana pada tahun 2024 serapan keuangannya sebesar 97,84 % dan tahun 2023 sebesar 97,76 %. Artinya adanya tidak jauh beda dikarena anggaran tahun lalu rendah capaian lebih tinggi dari tahun 2023 karena tahun 2024 ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 2.408.454.551 naik sebesar 20,69 %.

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang tahun 2024 dan untuk meningkatkan

kinerja pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan antar Lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan akses pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;
3. Meningkatkan layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;
4. Perlu peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih intensif melalui pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan pegawai negeri sipil (PNS).

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan Anggaran
3. Penetapan Kinerja Tahun 2024
4. IKU Tahun 2024
5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
6. Laporan Interim / Triwulan Tahun 2024
7. Laporan Keuangan TW.IV Tahun 2024
8. Pohon Kinerja Tahun 2024
9. Cascading Tahun 2024
10. Matrik Keselarasan Tahun 2024
11. Rencana Aksi Tahun 2024
12. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
13. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024